

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bencana merupakan suatu peristiwa atau rangkaian kejadian yang mengakibatkan korban penderitaan manusia, kerugian harta benda, kerusakan lingkungan, sarana dan prasarana serta dapat menimbulkan gangguan terhadap tata kehidupan dan penghidupan masyarakat. Karena letak geografis Indonesia yang sedemikian rupa, hal ini mengakibatkan Indonesia mudah diguncang oleh bencana alam seperti gempa bumi, erupsi gunung berapi, tsunami, banjir, kekeringan, dan tanah longsor.

Dalam undang-undang no 27 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana di jelaskan bahwa wilayah Negara kesatuan republik Indonesia memiliki kondisi geografis, biologis, hidrologis, dan demografis yang memungkinkan terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor nonalam, maupun faktor manusia yang menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat pembangunan nasional.

Salah satu kabupaten di Indonesia yang rawan bencana dan kurang perhatian adalah Kabupaten Kerinci, Kerinci merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Jambi, merupakan salah satu daerah rawan bencana, bencana yang sering terjadi di kabupaten kerinci antara lain tanah longsor, banjir, dan kebakaran hutan dan kebakaran pemukiman.

Dalam kurun waktu awal 2018 sampe mei 2018, bencana kebakaran hutan dan lahan seluas 288,5 hektare yang ada dalam Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. dengan rincian untuk bulan Januari tercatat ada sekitar 122 hektare hutan dan lahan yang terbakar berada di lokasi hutan dan lahan di Desa Sumur Jauh dengan luas lahan 14 hektare, Pancuran Tiga 23 hektare, Renah Kayu Embun 25 hektare, Ulu Air dan Sandaran Galeh 35 hektare, Talang Lindung 5 hektare, Tanjung Pauh Hilir 5 hektare, Bukit

Setiong 3 hektare, Masgo 10 hektare dan di hutan lahan desa Aur Duri seluas 2 hektare dengan kerugian diperkirakan Rp 5,6 Miliar. Sementara untuk Februari hingga tanggal 7 Februari 2018 ada sekitar 83,5 Hektar lahan yang terbakar, diantaranya di Desa Sanggaran Galeh 3 hektare, Tanjung Pauh Hilir 3,5 hektare, Renah Kayu Embun 5 Hektar dan hutan dan lahan yang kebakarannya paling besar terjadi di Desa Air Hangat Barat yang jumlah hutan dan lahan yang terbakar mencapai angka 45 hektare dengan kerugian diperkirakan ratusan juta rupiah. Sementara itu untuk bencana banjir dan tanah longsor dari Januari 2018 sampai Mei 2018 tercatat 291 jiwa dari 79 Kepala keluarga (KK) warga Desa Pelayang Raya dan Koto Tinggi, Kecamatan Pesisir Bukit, di terjang banjir bandang dan longsor. Sebanyak 50 KK dari korban banjir dan longsor tersebut kehilangan tempat tinggal akibat rumah mereka rusak diterjang banjir dan longsor. (data BPBD Kerinci).

Peraturan daerah Kabupaten Kerinci (PERDA) nomor 6 tahun 2010 pasal 4 menjelaskan, BPBD Kabupaten Kerinci mempunyai tugas: *a)* Menetapkan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanggulangan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara; menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan; *b)* Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana; *c)* Menyusun, menetapkan prosedur tetap penanggulangan bencana; *d)* Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada kepala daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana; *e)* mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang; *f)* Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerahnya; *g)* Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan *h)* Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian dalam pasal 5 dijelaskan bahwa Dalam menyelenggarakan tugas BPBD Kabupaten Kerinci mempunyai fungsi : *a)* Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan

bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; *b*) Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Menanggulangi bencana tidak bisa dilakukan secara mendadak melainkan butuh persiapan yang harus dilakukan jauh sebelum bencana itu datang melalui suatu proses yang disebut manajemen bencana. Salah satu persiapan yang dapat dilakukan sebelum suatu bencana itu datang adalah mempersiapkan Sumber Daya Manusia dengan baik yaitu salah satunya dengan melakukan pengembangan SDM yang dimiliki dengan memperkaya pengetahuan tentang peka terhadap lingkungan atau sering disebut dengan *Ecoliteracy* sangat penting untuk dilakukan. Mengingat, bencana alam tidak bisa diketahui secara pasti kapan dan dimana akan terjadi. Sehingga adanya pengembangan *Ecoliteracy* membuat Kabupaten Kerinci menjadi siap dan tanggap dalam menghadapi pencegahan bencana. Untuk itu kurikulum Pelatihan Guru dan Materi untuk siswa tentang *Ecoliteracy* di Kabupaten Kerinci penting dilakukan karena Kerinci merupakan kabupaten yang memiliki potensi bencana alam yang tinggi yang hampir semuanya disebabkan oleh tangan tidak bertanggung jawab dari oknum-oknum tertentu. oleh karena itu penulis ingin mengetahui bagaimana pengembangan Sumber Daya Manusia dalam *Ecoliteracy* pada satuan guru dan siswa di Kabupaten Kerinci. Istilah *ecoliteracy* dipopulerkan oleh seorang pendidik dari Amerika, David W.Orr (1992) dan fisikawan Fritjof Capra (1990). *Ecoliteracy* Merupakan konsep paradigma, sekaligus nilai baru yang dimasukkan dalam pendidikan menuju “kesejahteraan bumi”. Sebuah masyarakat melek ekologi akan menjadi masyarakat berkelanjutan, mengerti cara berpikir sistem, dan kompleksitas yang tidak merusak lingkungan alam sebagai tempat yang menggantungkan hidupnya. Pentingnya menumbuhkan gagasan *ecoliteracy* atau melek lingkungan dalam berbagai pola serta gaya hidup saat ini tentu sangat beralasan, karena persoalan global lingkungan hidup saat ini terciptanya *sustainable society* menjadi alasan utama perlunya menumbuhkan gagasan *ecoliteracy*. Gagasan cemerlang ini perlu diimplementasikan secara

nyata dalam berbagai program yang tentunya akan menjadi solusi praktis dalam mengatasi persoalan lingkungan hidup, penumbuhan gagasan ini tentunya harus disertai dengan pengembangan sumber daya manusia yang baik.(Supriatna,et al 2010).

Pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas ditujukan dalam rangka sebesar-besarnya untuk dapat memberikan manfaat bagi peningkatan produktivitas yang berkelanjutan bagi kemakmuran dan kemajuan bangsa sehingga dalam hal ini pemerintah melalui Permen No 101 Tahun 2000 memegang peran dan tanggung jawab penuh terhadap segala aktivitas yang berkaitan dengan pengembangan SDM tersebut tak terkecuali termasuk pada kegiatan-kegiatan diklat yang diselenggarakan oleh setiap instansi lembaga pemerintah dan pendidikan.

Upaya mencapai peningkatan *ecoliteracy* melalui pendidikan haruslah berawal dari pengetahuan dan pemahaman guru tentang *ecoliteracy* tersebut. Ardiansyah (2016), dalam penelitian menjelaskan bahwa “Guru IPS juga dituntut untuk menanamkan pengetahuan, sikap dan melatih keterampilan mereka dalam menghadapi persoalan lingkungan hidup”. Kemudian hal yang senada juga dijelaskan oleh Firdaus (2016), dalam penelitian yang menyatakan bahwa pembelajaran IPS dikenal dengan nama *social studies*, memiliki kekhasan sebagai pendidikan yang bersifat terpadu , interdisipliner, dan multidimensional . Pusat *Ecoliteracy (The center for Ecoliteracy)* sebagai sebuah lembaga lingkungan hidup di Amerika Serikat (2011), membagi empat kompetensi *literacy* yaitu: “...a set of ‘core competencies’ relate to the head (*learning to know*), the hands (*learning to do*) and the heart (*learnign to live together*). Goelaman, D. et al. (2012), mengemukakan lima poin untuk mengembangkan sikap *ecoliteracy*: a) *Develop Empathy For All Forms of Life*, b) *Embrace Sustainability as A Community Practice*, c) *Make the invisible visible*, d)*Anticipate Unintended Consequence*, e) *Understand How Nature Sustain Life*. Keberhasilan *ecoliteracy* tidak dapat dipisahkan dari pendidikan, salah satu upaya agar pemahaman *ecoliteracy* dapat diterapkan dalam dunia pendidikan adalah dengan melakukan pelatihan.

Pendidikan dan pelatihan atau yang sering disingkat sebagai diklat merupakan salah satu upaya yang digunakan oleh pemerintah dalam rangka melakukan pembinaan pengetahuan dan keahlian sebagai bekal dalam mengembangkan kecerdasan dan ketangkasan dari SDM yang ada. Selain itu, dengan memadukan konsep pendidikan dan ditambah dengan unsur-unsur pelatihan yang lekat dengan praktik penguasaan keilmuan yang bisa dipelajari dalam waktu relatif singkat dapat secara cepat memberikan kontribusi yang efektif dan efisien untuk menjawab kebutuhan permasalahan yang ada ditempat kerja dan lingkungan sekitar. Sehingga pada akhirnya diharapkan dengan adanya peningkatan kompetensi tersebut dapat memaksimalkan produktivitas kerja dan tujuan organisasi dapat dicapai dengan lebih optimal, tentunya harus di landasi dengan kurikulum yang baik, Kemudian diimplementasikan dalam program pendidikan yang salah satunya adalah Musyawarah guru mata pelajaran (MGMP). Undang-undang RI Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, mempersyaratkan guru untuk: (1) Memiliki kualifikasi akademik minimum S1/D4; (2) Memiliki Kompetensi sebagai agen pembelajaranyaitu pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional; (3) memiliki sertifikat pendidik. Dengan berlakunya undang-undang ini diharapkan memberikan suatu kesempatan yang tepat bagi guru untuk meningkatkan profesionalismenya melalui pelatihan, penulisan karya ilmiah, pertemuan di kelompok kerja guru, dan pertemuan di Musyawarah guru mata pelajaran (MGMP). Dengan demikian MGMP memiliki peran penting dalam mendukung pengembangan profesional guru.

(Matt & Danil J, 2007) menjelaskan dalam penelitiannya bahwa tidak ada kurikulum yang optimal dalam program pelatihan selain menciptakan kurikulum yang benar-benar berbasis kecakapan yang akan memungkinkan keberhasilan untuk keterampilan dan meningkatkan kinerja, adapun metode yang harus selalu dikembangkan adalah: 1) *Aparaturus* maksudnya adalah para aparatur atau peserta yang benar-benar berniat dan memiliki motivasi diri yang tinggi dalam mengikuti pelatihan, 2) *scoring metrics* maksudnya selalu melakukan evaluasi di setiap materi dan pelajaran di setiap sebelum

dan sesudah pembelajaran per pertemuan, 3) *Proficiency level development* maksudnya melakukan pengembangan di setiap tingkat kemahiran dalam kegiatan pelatihan yang dilakukan secara paralel.

(Mainor et al., 2017) pada penelitiannya tentang CPCRN (*Cancer Prevention and Control Research Network*) menjelaskan bahwa Kurikulum dibangun di atas kurikulum sebelumnya yang dikembangkan oleh Chinman dkk dan National Cancer Institute (Boyle & Homer, n.d.) dan termasuk konten yang mirip dengan kurikulum yang dikembangkan. Penyampaian pelatihan CPCRN telah terbukti memiliki dampak positif pada kompetensi peserta yang terkait dengan adopsi dan penerapan EBI (*Escoffery, Carvalho, & Kegler*). Pada konteks kurikulum pelatihan yang harus diperhatikan dalam membuat kurikulum program pelatihan adalah: 1) *Design survei cross-sectional*. Survei kepuasan dengan pertanyaan tertutup dan terbuka diberikan kepada peserta setelah selesainya setiap putaran pelatihan. 2) *Sampel and Setting* menentukan sampel penelitian yang dilakukan sebelum kurikulum dibuat dan pengaturan pembelajaran dari hasil sampel yang ditentukan baik secara manual maupun online. 3) *Measures* maksudnya melakukan tindakan dan pengukuran dengan survey yang diberikan di setiap pertemuan kegiatan pelatihan. 4) *Analisis*, Analisis deskriptif dilakukan dengan merinci frekuensi dan persentase tanggapan untuk setiap pertanyaan survei. Analisis tematik diterapkan untuk tanggapan ukuran sintesis untuk pertanyaan terbuka. Dua anggota tim membaca semua tanggapan dan tema yang diidentifikasi secara independen dan kemudian bertemu untuk membandingkan tema dan merekonsiliasi setiap ketidaksesuaian (Miles & Huberman, 1994). 5) *Quantitative Findings* maksudnya membuat instrumen berupa angket tentang Persepsi peserta tentang relevansi pelatihan umum dengan pekerjaan mereka tetap stabil di seluruh format program pelatihan yang diukur dengan skala likert atau persentase. 6) *Qualitative Findings* Empat faktor diidentifikasi yang memengaruhi kepuasan praktisi dengan pelatihan: interaksi dengan teman sebaya dan pelatih, alat yang dapat mereka gunakan, konten komprehensif versus yang disesuaikan, dan kemampuan untuk menyesuaikan

pelatihan ke dalam jadwal kerja yang sibuk. Praktisi menghargai kesempatan untuk berinteraksi dengan teman sebaya dan pelatih. Satu peserta melaporkan bahwa aspek yang paling bermanfaat dari pelatihan termasuk kegiatan tim, umpan balik langsung dari presenter, dan mendengar peserta lain. Interaksi dengan teman sebaya adalah yang terbesar dalam pelatihan pribadi dan terjadi selama kegiatan kelompok dan istirahat.

(Sukanto, 2012) dalam penelitiannya membuktikan bahwa terdapat variabel lain yang dapat mempengaruhi efektivitas lembaga diklat, antara lain iklim organisasi, persepsi keprofesian hubungan kerja dan struktur organisasi. Artinya bahwa faktor internal juga dapat mempengaruhi efektivitas dari penyelenggaraan diklat. Hal senada juga didapatkan dari hasil observasi pra penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya menyimpulkan bahwa pelaksanaan diklat tidak hanya berfokus pada *hard skill* nya saja tapi *soft skill* juga sangat diperlukan dalam pelatihan, seperti pelatihan yang mengembangkan SDM melalui pendidikan dan kurikulum *ecoliteracy*. Hal ini menjadi sangat penting dalam pengembangan SDM dan juga dalam hal pencegahan bencana, karena bencana terjadi dikarenakan ada campur tangan atau ulah dari perbuatan manusia itu sendiri.

Hal fundamental dan pertama yang dilakukan dalam perancangan atau pengembangan desain kurikulum adalah *need assessment* atau analisis kebutuhan. Agar kurikulum yang didesain tepat sasaran dan berdaya guna tinggi dalam peningkatan kompetensi peserta didik, maka analisis kebutuhan adalah hal yang sangat urgen. Oleh karena itu, analisis kebutuhan merupakan gambaran seperti apa kurikulum yang akan dirancang nantinya.

Analisis kebutuhan ini sangat dibutuhkan agar kegiatan ini mempunyai kurikulum yang tersistem rapi dan responsif terhadap kondisi sosial yang terjadi di masyarakat. *Need assessment is a formal process which determines the gaps between current outputs or outcomes and required or desired outcomes or outputs; places this gaps in priority order and selects the most important resolution* (Hermino, 2013).

Need assessment merupakan langkah awal yang penting dan mendasar dalam mengembangkan maupun merevisi sebuah program. Analisis kebutuhan ini berguna dalam penyusunan kurikulum pelatihan *ecoliteracy*. Analisis kebutuhan dilakukan terhadap empat komponen utama kurikulum yakni tujuan, konten, strategi dan evaluasi. Sehingga nanti dihasilkan seperti apa permasalahan tentang 4 komponen kurikulum tersebut. Kemudian dirumuskan seperti harapan dan seharusnya tujuan, konten, strategi dan evaluasi kegiatan pelatihan yang akan dilaksanakan yang sehingga bisa memberi dampak baik bagi pendidikan *ecoliteracy*.

Pendidikan bukan hanya soal membuat manusia menjadi pintar secara intelektual akan tetapi lebih dari itu, yaitu bagaimana menjadikan manusia menjadi baik budi pekertinya. Sejatinya sejak dahulu orientasi afektif atau pembentukan karakter tidak bisa dipisahkan dalam berbagai upaya pendidikan. (David Light, 2011) menegaskan bahwa “*education should develop intellectual character, moral character, civic character, and performance character, along with the collective character of the school. Together, the four forms of personal character define what it means to be a competent, ethical, engaged, and effective adult member of society*”. Empat komponen ini merupakan cita-cita pendidikan secara utuh dan sekaligus merupakan gambaran seperti apa peserta didik yang akan dididik nantinya.

Pemahaman dari identifikasi ragam masalah yang diperoleh dari penelitian terdahulu diatas dapat disimpulkan secara singkat bahwa yang menjadikan ketidak-efektifnya program diklat untuk penanggulangan bencana disebabkan dari beberapa faktor penyebab baik itu dikarenakan kurang maksimalnya penanaman nilai dan pemahaman tentang *ecoliteracy* pada materi diklat yang hanya berfokus pada *hard skill* nya saja. Jika kendala tersebut tidak sesegera mungkin diatasi maka pada akhirnya akan berimbas pada menurunnya kualitas lulusan atau output diklat. Sehingga, tidak heran jika hasil dari diklat yang terselenggara secara rutin dilaksanakan mendapati hasil yang kurang maksimal dalam hal penanggulangan bencana akibat dari kebutuhan dari peserta diklat belum terpenuhi dengan baik. (Sukardi, 2014)

menyimpulkan bahwa keberhasilan dari sebuah program diklat tidak lepas dari elemen-elemen pendukung yang saling mengikat satu sama lainnya, diantaranya yaitu kurikulum, kinerja instkturtur/ widyaiswara, respons peserta diklat, proses instruksionalnya, dan juga penanaman nilai didalam materi diklat yang kurang diperhatikan.

Penjelasan latar belakang yang telah dijabarkan sebelumnya mengenai pentingnya pemahaman tentang *ecoliteracy*, maka dari itu peneliti bermaksud melakukan penelitian pengembangan Kurikulum pelatihan *ecoliteracy* bagi forum Musyawarah guru mata pelajaran (MGMP) IPS SMP di Kabupaten Kerinci.

B. Rumusan Masalah Penelitian

1. Rumusan Masalah Umum

Masalah umum dalam penelitian ini yaitu: *“Bagaimana Desain Kurikulum Ecoliteracy pada Pelatihan Guru MGMP IPS SMP di Kabupaten Kerinci?”*

2. Rumusan Masalah Khusus

Berdasarkan pernyataan masalah umum diatas, berikut ini ada beberapa penjabaran pernyataan khusus guna memfokuskan penelitian ke beberapa aspek terkait Kurikulum pelatihan *Ecoliteracy* bagi guru MGMP IPS SMP di Kabupaten Kerinci dalam upaya pencegahan dan pelestarian alam, yaitu:

- a. Bagaimana *need assessment* kurikulum *ecoliteracy* pada diklat guru MGMP IPS SMP di Kabupaten Kerinci?
- b. Bagaimana rumusan kompetensi kurikulum *ecoliteracy* pada diklat guru MGMP IPS SMP di Kabupaten Kerinci?
- c. Bagaimana rancangan materi kurikulum *ecoliteracy* yang sesuai dengan kebutuhan diklat guru MGMP IPS SMP di Kabupaten Kerinci?
- d. Bagaimana rancangan proses pada implementasi kurikulum *ecoliteracy* pada diklat guru MGMP IPS SMP di Kabupaten Kerinci?
- e. Bagaimana rancangan evaluasi kurikulum *ecoliteracy* pada diklat guru MGMP IPS SMP di Kabupaten Kerinci?

- f. Bagaimana penilaian ahli tentang desain kurikulum *ecoliteracy* pada diklat guru MGMP IPS SMP di Kabupaten Kerinci?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji desain pengembangan kurikulum *ecoliteracy* pada diklat guru MGMP SMP di Kabupaten Kerinci yang mengkaji komponen-komponen kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan diklat.

2. Tujuan Khusus

Berdasarkan tujuan umum tersebut dapat dirincikan sejumlah tujuan khusus, antara lain:

- a. Untuk mengkaji rumusan *need assessment* pada kurikulum *ecoliteracy* pada diklat guru MGMP IPS SMP di Kabupaten Kerinci.
- b. Untuk mengkaji perumusan kompetensi pada kurikulum *ecoliteracy* pada diklat guru MGMP IPS SMP di Kabupaten Kerinci.
- c. Untuk mengkaji rancangan konten kurikulum *ecoliteracy* pada diklat guru MGMP IPS SMP di Kabupaten Kerinci.
- d. Untuk mengkaji rancangan proses pada implementasi kurikulum *ecoliteracy* pada diklat guru MGMP IPS SMP di kabupaten Kerinci.
- e. Untuk mengkaji rancangan evaluasi kurikulum *ecoliteracy* pada diklat guru MGMP IPS SMP di Kabupaten Kerinci.
- f. Untuk mengetahui penilaian ahli tentang desain kurikulum *ecoliteracy* pada diklat guru MGMP IPS SMP di Kabupaten Kerinci.

D. Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi peneliti dalam memahami dan memberikan masukan terhadap pemecahan masalah yang ada dalam pemahaman *ecoliteracy* pada program diklat. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan bisa menjadi tambahan referensi rujukan baik dari segi literatur keilmuan, data, dan fakta yang berguna bagi guru dalam forum

musawarah guru mata pelajaran (MGMP) IPS maupun bagi peneliti lain

HOLIL PADLI, 2019

DESAIN KURIKULUM *ECOLITERACY* PADA DIKLAT MUSYAWARAH GURU MATA PELAJARAN (MGMP) IPS SMP DI KABUPATEN KERINCI

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

dalam penelitian yang serupa ditempat yang berbeda. Adapun secara singkat manfaat dari penelitian ini dapat disimpulkan, sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Bagi akademisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih referensi secara teoritis sebagai masukan untuk lebih memahami kajian Kurikulum Diklat *ecoliteracy*. Pengembangan khususnya dalam memahami konsep perancangan dan pengembangan kurikulum diklat yang masih kurang mendapatkan perhatian lebih dari para peneliti di bidang pengembangan kurikulum kediklatan.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan juga dapat menjadi solusi alternatif dalam memecahkan masalah terutama terkait *ecoliteracy* pada pengembangan kurikulum diklat sehingga diharapkan para pihak yang terlibat nantinya mendapatkan informasi alternatif yang menjadi bahan kajian bagi guru MGMP dalam memantau sejauh mana keberhasilan dan keefektifan program pelatihan yang diselenggarakan. Terakhir, temuan dari hasil penelitian diharapkan bisa dipakai sebagai umpan balik (*feedback*) dalam memberikan masukan yang berguna untuk memperbaiki kinerja dan evaluasi diklat yang berguna untuk perbaikan program diklat di masa yang akan datang.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional disusun agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menafsirkan istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini. Definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Desain Kurikulum

Desain kurikulum adalah rancangan pengorganisasian komponen-komponen kurikulum *ecoliteracy* pada diklat guru MGMP IPS SMP Kabupaten Kerinci. Dalam penelitian ini desain kurikulum lebih mengarah kepada *Problem-centered designs curriculum* yang merupakan desain

kurikulum berfokus pada masalah-masalah kehidupan, baik masalah individu maupun masalah sosial (Zais, 1976)

2. Diklat kurikulum *ecoliteracy*

Diklat kurikulum *ecoliteracy* adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kompetensi *ecoliteracy* dalam melaksanakan dan menyamoaikan pembelajaran kepada peserta didik yang kemudian memberikan dampak yang sangat baik bagi lingkungan dan alam. Dalam penelitian ini hal yang mengembangkan sikap *ecoliteracy* Goelaman, D. et al. (2012), yaitu sebagai berikut:

- a) *Develop Empathy For All Forms of Life,*
- b) *Embrace Sustainability as A Community Practice,*
- c) *Make the invisible visible,*
- d) *Anticipate Unintended Consequense,*
- e) *Understand How Nature Sustain Life.*

3. Musyawarah guru mata pelajaran (MGMP)

MGMP merupakan forum atau wadah kegiatan profesional guru mata pelajaran sejenis yang pada hakikatnya berfungsi sebagai wadah atau sarana komunikasi, konsultasi dan tukar pengalaman dengan harapan dapat meningkatkan profesionalisme guru dalam melaksanakan pembelajaran yang bermutu sesuai dengan kebutuhan.